

OPTIMASI PROGRAM KAMPUNG ANAK NEGERI DI UPTD SURABAYA

Banun Prabawanti¹, Hasan Ismail²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

(banunprabawanti363@gmail.com, hasanismail@untag-sby.ac.id)

ABSTRAK

Program Kampung Anak Negeri yang dijalankan oleh UPTD Surabaya merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani permasalahan anak jalanan dan anak rentan sosial. Meskipun telah memberikan dampak positif, pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi manajemen, keterlibatan stakeholder, maupun efektivitas program pembinaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengoptimalkan pelaksanaan program Kampung Anak Negeri melalui analisis terhadap struktur kelembagaan, kualitas layanan, dan sinergi antarinstansi terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimasi program dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan kemitraan strategis, serta evaluasi berkala terhadap kurikulum pembinaan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kampung Anak Negeri dapat lebih efektif dalam memberdayakan anak-anak agar kembali ke jalur pendidikan formal dan kehidupan sosial yang sehat.

Kata kunci : optimasi program, anak jalanan, UPTD Surabaya, Kampung Anak Negeri, pemberdayaan sosial.

ABSTRACT

The Kampung Anak Negeri program managed by the UPTD Surabaya is one of the government's efforts to address the issues of street children and those vulnerable to social problems. While the program has had a positive impact, it still faces several challenges, including management inefficiencies, limited stakeholder engagement, and gaps in the effectiveness of its development initiatives. This study aims to analyze and optimize the implementation of the Kampung Anak Negeri program by examining institutional structures, service quality, and inter-agency collaboration. A qualitative descriptive method with a case study approach was employed. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The findings indicate that optimization can be achieved through improved human resource capacity, strengthened strategic partnerships, and regular evaluation of the development curriculum. These improvements are expected to enhance the program's effectiveness in empowering children to return to formal education and reintegrate into a healthy social environment.

Keywords : program optimization, street children, UPTD Surabaya, Kampung Anak Negeri, social empowerment.

PENDAHULUAN

Masalah anak jalanan merupakan salah satu isu sosial yang tak kunjung usai di Indonesia. Anak-anak yang hidup dan beraktivitas di jalanan bukan hanya menghadapi kondisi ekonomi yang buruk, tetapi juga berisiko tinggi mengalami kekerasan fisik, eksploitasi, serta kehilangan hak atas pendidikan, perlindungan, dan pengasuhan yang layak. Kondisi ini mencerminkan lemahnya sistem perlindungan sosial dan ketimpangan ekonomi yang masih terjadi di berbagai wilayah. Di Kota Surabaya, permasalahan anak jalanan menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial, tetapi juga menyangkut masa depan generasi muda yang menjadi aset bangsa. Sebagai respons terhadap fenomena tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial mendirikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kampung Anak Negeri. Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan, pendidikan nonformal, pelatihan keterampilan, dan pembinaan mental bagi anak-anak jalanan maupun anak yang hidup dalam kondisi rentan. Kampung Anak Negeri menjadi wadah rehabilitasi sosial sekaligus sarana pemberdayaan yang bertujuan mengembalikan fungsi sosial anak agar mereka dapat hidup layak, kembali ke lingkungan keluarga, serta melanjutkan

pendidikan formal.

Namun demikian, seiring berjalannya waktu, pelaksanaan program Kampung Anak Negeri menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, belum maksimalnya partisipasi masyarakat dan lembaga non-pemerintah, serta kurangnya monitoring dan evaluasi berbasis data yang terintegrasi. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan anak dan layanan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun niat program ini sangat baik, pelaksanaannya perlu dioptimalkan agar mampu menjawab permasalahan yang kompleks dan dinamis.

Optimasi program dalam konteks ini berarti peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program melalui perbaikan tata kelola, penguatan sinergi antarinstansi, inovasi layanan, dan pengembangan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis kebutuhan anak. Program yang optimal diharapkan tidak hanya menyentuh aspek fisik dan ekonomi anak, tetapi juga mencakup aspek psikologis, pendidikan, sosial, dan spiritual.

Perhatian terhadap anak-anak yang hidup dalam situasi rentan, termasuk anak jalanan, telah menjadi bagian dari agenda kebijakan nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di tingkat daerah, kebijakan ini diturunkan dalam bentuk program-program sosial yang bertujuan menekan angka anak jalanan dan mendorong reintegrasi sosial mereka ke dalam keluarga maupun lingkungan pendidikan.

Kampung Anak Negeri merupakan bentuk konkret dari kebijakan daerah yang mendukung amanat undang-undang tersebut. Program ini tidak hanya memberikan tempat tinggal sementara, tetapi juga menyediakan layanan pendidikan nonformal, konseling psikologis, pelatihan keterampilan kerja, hingga pendekatan spiritual. Namun, optimalisasi layanan tersebut sangat bergantung pada kualitas manajemen, strategi intervensi, dan dukungan lintas sektor yang berkelanjutan.

Dalam praktiknya, tidak sedikit kendala yang dihadapi. Kurangnya pemetaan kebutuhan anak secara individual menyebabkan program seringkali bersifat umum dan tidak tepat sasaran. Selain itu, keberhasilan program dalam jangka pendek belum tentu berdampak jangka panjang, terutama jika anak-anak yang telah mendapatkan pembinaan kembali ke lingkungan sosial yang tidak mendukung. Oleh karena itu, evaluasi dan pengembangan strategi optimasi menjadi penting, terutama dalam konteks keberlanjutan dan efektivitas program.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Kota Surabaya dan UPTD Dinas Sosial Kota Surabaya. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) merupakan panti-panti sosial yang berada dibawah naungan Dinas Sosial dengan fungsi sebagai pemberian pelayanan langsung kepada para penyandang masalah terkait kesejahteraan sosial yang telah terseleksi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung. Sehingga dapat dikatakan pengabdian ini menggunakan sumber data primer. Sasaran dari pengabdian ini merupakan Masyarakat PMKS di Kota Surabaya. Dimana Masyarakat PMKS di Kota Surabaya tersebut tidak hanya yang ada di UPTD namun juga di luar UPTD. Langkah-langkah atau proses pengabdian Dinas Sosial Kota Surabaya diawali dengan pengarahan dari pihak dinas sosial, pengarahan Staff, pengenalan divisi, pengenalan UPTD hingga pelaksanaan kegiatan baik di Kantor Dinas Sosial maupun di UPTD Dinas Sosial Kota Surabaya. Untuk mengetahui tahapan bahwa Masyarakat tersebut dikatakan termasuk golongan PMKS, maka perlu adanya pendataan dengan tahapan :



Gambar 1. Timeline Magang Mandiri

Dalam pelaksanaan kegiatan magang yang dilaksanakan oleh mahasiswa ini dibagi menjadi beberapa tahapan yang meliputi : tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Tahapan dari pelaksanaan kegiatan magang tersebut dijelaskan sebagai berikut;

1. Tahap Persiapan

Sebelum dapat melaksanakan kegiatan Magang di Dinas Sosial Kota Surabaya, penulis melaksanakan tahapan pendaftaran pada SSWALFA (Surabaya Single Window), dimana dalam melakukan pendaftaran tersebut terdapat beberapa dokumen yang harus disiapkan diantaranya adalah Surat Rekomendasi dari fakultas, CV, dan proposal magang yang harus dilengkapi. Setelah itu Pengajuan Surat Permohonan Magang, Koordinasi dengan Instansi Tujuan, Setelah peserta akan mendapatkan email pernyataan persetujuan dari Dinas Sosial Kota Surabaya untuk menerima tawaran magang tersebut. Setelah dinyatakan lolos dan menerima tawaran dari mitra, penulis kemudian melakukan koordinasi dengan kepala program studi terkait dengan konversi mata kuliah dalam pelaksanaan kegiatan magang ini.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan magang pada Dinas Sosial Kota Surabaya ini dimulai pada tanggal 13 Januari 2025 s/d 07 Maret 2025. Pada pelaksanaan magang yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Surabaya, ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menekankan pada analisa dan deskriptif. Pelaksanaan kegiatan Magang Mandiri yaitu pada Dinas Sosial Kota Surabaya terletak di Jl. Arief Rahman Hakim No.131-133, Keputih, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60117. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 bulan kerja yang terhitung mulai pada tanggal 13 Januari 2025 s/d 07 Maret 2025 atau selama 40 hari kerja.

Jadwal jam kerja selama pelaksanaan program Mandiri (Dinas Sosial Kota Surabaya) adalah mengikuti aturan jam kerja dari instansi atau mitra terkait. Detal jam kerja yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jadwal Jam Kerja Mahasiswa Magang Mandiri Dinas Sosial Kota Surabaya

Hari	Waktu Pelaksaaan	Keterangan Kegiatan Harian
Senin	07.30 s/d 16.00	Penyaturan Alat Bantu Kepada Masyarakat Alat Bantu Telingga dan Kursi Roda
Selasa	07.30 s/d 16.00	Mengecek Data Bantuang Uang dan di sesuaikan dengan Nota
Rabu	07.30 s/d 16.00	Penyaturan Alat Bantu Kepada Masyarakat Alat Bantu Telingga dan Kursi Roda

Kamis	07.30 s/d 16.00	Penyaturan Alat Bantu Kepada Masyarakat Alat Bantu Telingga dan Kursi Roda
Jum'at	07.30 s/d 16.30	Menyusun Data SPJ

HASIL dan PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kampung Anak Negeri yang dijalankan oleh UPTD di bawah Dinas Sosial Kota Surabaya telah berperan sebagai pusat rehabilitasi sosial bagi anak jalanan, anak terlantar, dan anak dari keluarga bermasalah sosial. Program ini mencakup layanan rehabilitasi psikososial, pendidikan nonformal, pelatihan keterampilan, serta pembinaan moral dan karakter. Secara umum, implementasi program sudah berjalan, namun masih terdapat berbagai kendala yang perlu diperbaiki guna mencapai optimalisasi.

Partisipasi anak dalam program cukup tinggi, tetapi keterlibatan keluarga masih minim, yang menjadi tantangan dalam proses reintegrasi sosial. Selain itu, kemitraan dengan pihak luar seperti LSM dan dunia usaha sudah ada namun belum berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

Untuk mengoptimalkan program, diperlukan penguatan kapasitas SDM, peningkatan peran keluarga, inovasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta evaluasi program secara berkala. Kolaborasi multisektor yang lebih terstruktur juga sangat diperlukan guna memastikan keberlangsungan dan dampak jangka panjang dari program pembinaan anak jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri.

Dalam hal sumber daya manusia, ditemukan bahwa tenaga pendamping dan staf pelaksana belum mencukupi secara kuantitas maupun kualitas. Banyak staf yang merangkap tugas administratif dan pelayanan sosial, sehingga kurang maksimal dalam memberikan perhatian personal kepada setiap anak. Ketiadaan tenaga psikolog tetap juga menjadi hambatan dalam penanganan kasus-kasus anak dengan trauma mendalam atau perilaku adiktif.

Fasilitas fisik atau sarana dan prasarana di Kampung Anak Negeri dinilai cukup baik, dengan tersedianya ruang kelas, asrama, ruang makan, ruang keterampilan, dan fasilitas olahraga. Namun, beberapa peralatan pelatihan masih bersifat dasar dan kurang variatif, sehingga membatasi jenis keterampilan yang bisa diajarkan kepada anak-anak.

Dari sisi partisipasi anak dan keluarga, anak-anak menunjukkan minat dan partisipasi tinggi terhadap kegiatan yang interaktif dan praktis. Namun, keterlibatan keluarga masih rendah, terutama dari keluarga anak yang sudah lama hidup di jalanan.

Ketidaksiapan orang tua atau wali dalam menerima kembali anak setelah rehabilitasi menjadi salah satu kendala dalam proses reintegrasi sosial. Hal ini menunjukkan pentingnya peran keluarga dalam keberhasilan jangka panjang program pembinaan.

Kemudian, terkait kemitraan dan kolaborasi, UPTD Kampung Anak Negeri telah bekerja sama dengan beberapa lembaga swasta, LSM, dan komunitas lokal, misalnya untuk pelatihan keterampilan atau penyediaan materi edukatif. Akan tetapi, kemitraan ini belum bersifat berkelanjutan dan belum memiliki sistem monitoring bersama, sehingga belum mampu

memberikan dampak maksimal bagi pengembangan program.

Gambar 2. Penyaluran Alat Bantu Telingga dan Gambar 3. Kunjungan Ke UPTD Wonorejo Kursi Roda



Gambar 4. Program Pembuatan dan Penyalura Liponsos Kaki dan Tangga Palsu Kepada Masyarakat Mengikuti Kegiatan di Sana

Gambar 5. Kunjungan ke UPTD Keputih Untuk

Kegiatan Pengabdian pada Dinas Sosial Kota Surabaya ini dilaksanakan untuk mengimplementasikan teori yang didapatkan dan dipelajari selama mengampu pendidikan di bangku perkuliahan. Ilmu yang diimplementasikan dalam pelaksanaan magang ini sesuai dengan program studi yang diampu yakni program studi Administrasi Negara dengan bidang keilmuan yang diterapkan adalah pelayanan publik. Selain itu, mata kuliah yang diimplementasikan dari kegiatan ini adalah terkait dengan Etika Pelayanan Publik dan juga birokrasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Program Kampung Anak Negeri yang dijalankan oleh UPTD di bawah Dinas Sosial Kota Surabaya telah memberikan kontribusi yang berarti dalam rehabilitasi dan pembinaan anak jalanan serta anak-anak yang rentan secara sosial. Program ini mencakup kegiatan pendidikan nonformal, pelatihan keterampilan, pembinaan karakter, serta reintegrasi sosial. Anak-anak mendapatkan pendampingan dan akses terhadap layanan dasar, yang menjadi langkah penting dalam mendukung perubahan hidup mereka ke arah yang lebih baik.

Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan tenaga profesional (pendamping sosial, psikolog, dan instruktur keterampilan), minimnya keterlibatan keluarga dalam proses rehabilitasi, serta lemahnya sistem evaluasi dan kolaborasi multisektor yang belum optimal. Untuk itu, optimalisasi program menjadi hal yang mendesak agar tujuan rehabilitasi dan pemberdayaan anak benar-benar tercapai secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, disarankan beberapa langkah strategis: pertama, perlu adanya peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan perekrutan tenaga profesional. Kedua, keterlibatan keluarga perlu diperkuat dengan pendekatan partisipatif, seperti konseling keluarga dan pemberdayaan ekonomi rumah tangga. Ketiga, program pelatihan keterampilan perlu dikembangkan secara lebih variatif dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja, termasuk keterampilan digital dan kewirausahaan. Keempat, penting untuk membangun sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja yang jelas. Kelima, dibutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara UPTD, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial untuk mendukung keberlanjutan program.

Dengan optimalisasi di berbagai aspek tersebut, Program Kampung Anak Negeri diharapkan tidak hanya menjadi tempat rehabilitasi sementara, tetapi mampu menjadi wadah transformasi

sosial yang berkelanjutan bagi anak-anak yang rentan, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri, bermartabat, dan produktif di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, S. (2018). Street Children and its Impacts on Society. 2(4), 12–22.
- Cahyadi, B. B. N., Puspitasari, N. Z., Britania, D. A., & Wahyudi, K. E. (2021). Efektivitas Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(5), 731–742.
- Danis, M., Wati, M., & Qomaruddin, M. B. (2020). Analisis Kepatuhan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok Pada Anak Asuh UPTD Kampung Anak Negeri Analysis of Compliance with Non-Smoking Area Regulations in Foster Care of Regional Technical Implementation Unit of Kampung Anak Negeri. 8(1), 99–110.
- Deddy Mulyadi. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BANDUNG. XVI(1), 66–80.
- Engkus. (2019). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan di Kota Bandung. *Bina Ilmiah*, 561(3), 2077–2081.
- Kertati, I. (2018). Deformasi Kebijakan Penangan Anak Jalanan Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 12(1), 129–142.
- Kurnianingsih, M., Fitriaciada, A., Dimiyati, K., Wardiono, K., & Nurrachman, A. D. (2022). International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Criminal Victimization : Women and Fintech Financing from the Theory of Lifestyle Exposure. 157–165.
- Millenia Prihatini. (2019). Komunikasi interpersonal da'i pendamping anak jalanan di rumah singgah salvatore surabaya. 30, 183–200.
- Setyorini, D. C., Sosiologi, P., & Sosial, R. (2018). BENTUK INTERAKSI SOSIAL PEGAWAI REHABILITASI SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DINAS SOSIAL SURABAYA. *Paradigma*, 06.
- Silvia Ayu Ariyanti. (2019). EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN ANAK PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KAMPUNG ANAK NEGERI DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA Silvia Ayu Ariyanti Abstrak.
- Street, M. (2021). Theorising child well-being: Towards a framework for analysing Early Childhood Education policy in England. *Journal of Early Childhood Research*, 19(2), 211–224.